

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Andi Tenripadang. 2016. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*. 14:67.
- Aryo, M. A., & Mahendra Wiswayana, W. 2020. Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran dari Deterensi ke Strategi Ekonomi (The New Maritime Policy Orientation of Indonesian Government: Shifting From Deterrence to Economic Strategy). *Jurnal Lemhannas RI*. 8: 57–75.
- Awaliyah, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, N. I., & Ruslan. 2020. Enforcement of *Illegal Fishing* Laws that was done by foreign ships in the Indonesian sea region, viewed from international sea law. *International Journal of Criminology and Sociology*. 9:1164–1173.
- Chairun Nasirin, dkk. 2017. Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Penangkapan ikan ilegal di Indonesia, *Jurnal Spirit Publik*. 12:17.
- Chapsos, I., & Hamilton, S. (2018). *Indonesia's maritime policy and illegal, unreported, and unregulated fishing*. *Marine Policy*, 97(6), 123-130.
- Desi, Y. 2020. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Penangkapan ikan ilegal Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8: 61–78.
- Haryanto dan Joko Setiyono. 2017. Haryanto, H., & Setiyono, J. (2017). Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal Fishing* oleh pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum pidana internasional. *Law Reform*, 13(1), 70–85. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952>. *Jurnal Law Reform Program Studi*.

- Haryanto, B. (2018). Konflik Perikanan di Laut Natuna Utara. *Jurnal Maritim*, 15(3), 45-60.
- Istiqomah, N., & Yusran, Y. 2022. Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Penangkapan ikan ilegal di Indonesia Pada Tahun 2014 - 2019. *Balcony*. 5:187–195. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/265>
- Mawardi Khairi, Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Penangkapan ikan ilegal) di Indonesia Fiat. 2016. *Justisia Journal of Law*. 10:247.
- Muhammad, S. V. 2012. Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Jurnal Illegal Fishing*. 3:59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Nikijuluw, V. P. H., et al. (2002). *The Economic Impact of Illegal Fishing in Indonesia*. *Fisheries Economics Review*, 8(2), 145-162.
- Nurfadilah, M. A., Syahrin, S. A., Rahayu, E. P., Hukum, F., & Janabadra, U. 2023. *Jurnal Qistie*. 16: 139–156.
- Santosa, R. (2020). Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia dalam Kebijakan Penangkapan ikan ilegal. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 130-144.
- Suproboningrum Lintang. 2018. Peran Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura untuk Menekan Angka Pembajakan dan Perompakan Laut di Selat Malaka. *Jurnal Hubungan Internasional*. 11:1. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JHI/article/viewFile/4836/10923>
- Susanti, L. (2019). Indonesia-China Maritime Tensions: Legal and Diplomatic Perspectives. *Indonesian Journal of International Law*, 17(2), 220-238.
- Suswoto, S., Nurfadilah, M. A., Syahrin, S. A., & Rahayu, E. P. (2023). Peneggelaman kapal asing yang melakukan *illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif hukum laut internasional. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).

Thantowi Jawir. 2017. Pembakaran dan Penggelaman Kapal Nelayan Asing di Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional. *Jurna Pandecta* 12:2. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/11335/7200>

Ussama A. 2003. Review in the judicial sector of the territorial waters of Indonesian. *Jurnal Keadilan*. 3:344.

Yunitasari, D. (2020). Penenggelaman kapal pencuri ikan di Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum Laut*, 7(3), 210-225.

### **Buku**

Brownlie, Ian (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford :Oxford University Press, 2019.

Widodo, J., & Kalla, J. (2014). *Sembilan Program Pembangunan Ekonomi Maritim*. Jakarta: Sekretariat Negara.

### **Website**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 dari situs resminya di <http://bps.go.id>. Diakses tanggal 7 Juli 2019.

Berdasarkan informasi di <https://nasional.sindonews.com>, Frans H. Winarta , “Konsekuensi Penenggelaman Kapal”, Kamis, 11 Desember 2014. Diakses pada tanggal 09 Januari 2024 jam 19.40 WIB

Dahuri, R. (2002). *Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Indonesia*. Retrieved from <http://www.ekonomifisheries.com>.

Detik Finance. (2015). *Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp100,30 triliun akibat illegal fishing*. Retrieved from <https://finance.detik.com/>

Elba Damhuri,. “Menteri Susi dan Kontroversi Penenggelaman Kapal”. 10 januari 2018.

Diakses pada tanggal 09 Januari 2024 jam 19.40 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Laporan penangkapan kapal asing ilegal di Indonesia*. Retrieved from <https://kkp.go.id/>

Parthiana, I. W. (2013). *The Rise of Illegal Fishing as a Global Transnational Crime*. Retrieved from <http://www.fisheriesreview.com>.

Sutriyanto, E. (2018). *Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 125 kapal*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/>

### **Skripsi**

Mhd. Reza Ramadhan Hsb. 2018. Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Diwilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Unclos 1982. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Salmiatun Budi Utami. 2017. Kebijakan China Menghalangi Proses Penangkapan Pelaku Penangkapan ikan ilegal Oleh Indonesia Di Perairan Natuna. Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. halaman 17-18.

### **Undang-Undang (UU)**

Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. UU No. 8 Tahun 1981.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. UU No. 31 Tahun 2004.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. UU No. 45 Tahun 2009.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. UU No. 27 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (2009). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

### **Peraturan Pemerintah**

Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan*. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005.

Indonesia. (2005). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Peraturan Menteri No. PER.13/MEN/2005.

Indonesia. (2005). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan*. Peraturan Menteri No. PER.14/MEN/2005.

Indonesia. (2005). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan dan/atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*. Peraturan Menteri No. PER.15/MEN/2005.

### **Konvensi dan Perjanjian Internasional**

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). Retrieved from <https://www.un.org/>